



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Wakil Menteri Kesehatan RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 4 Juni 2012
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara : 1. Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2013;
2. Paparan dan Pengesahan tentang alokasi anggaran APBN-P Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Pemerintah c.q Menteri Keuangan tanggal 28 Mei 2012.
Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota : 39 orang dari 51 Anggota Komisi IX DPR RI, 1 orang izin.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Wakil Menteri Kesehatan RI dibuka pukul 10.40 WIB, setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 245

2. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan penyesuaian program di dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, sesuai persetujuan alokasi anggaran sehingga tepat sasaran dan efektif, sekaligus menyongsong pelaksanaan BPJS Kesehatan Tahun 2014.
3. Komisi IX DPR-RI menyetujui APBN-P Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 2.498.000.000.000,- (**Dua Trilyun Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah**),- dan akan memperjuangkan tambahan alokasi APBN-P Tahun Anggaran 2012 dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI.
4. Guna mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat agar tercipta pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dalam rangka menyongsong pelaksanaan BPJS Kesehatan Tahun 2014, maka Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk:
 - menyeimbangkan upaya renovasi dan pemenuhan kebutuhan tempat tidur dengan pengadaan fasilitas kesehatan dasar di daerah;
 - revitalisasi Puskesmas;
 - membuat *road map* sistem rujukan;
 - melakukan realokasi anggaran untuk pendistribusian secara merata dan peningkatan profesionalisme SDM Kesehatan;
 - membuat kebijakan dan proposal disertai rekomendasi pemerintah daerah untuk membantu daerah menerapkan *e-planning* dengan tepat dan efisien.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk memperluas program yang bersifat promotif dan preventif.
6. Komisi IX DPR-RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan perhatian khusus dan pembinaan kepada profesi Tukang Gigi dan Verifikator Independen Jamkesmas sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.
7. Komisi IX DPR-RI meminta Kementerian Kesehatan RI memberikan data Tahun 2008-2012 tentang kuota penerima Jamkesmas dan Jampersal serta penyerapan anggaran program tersebut paling lambat 18 Juni 2012.

Rapat diakhiri pukul 14.20 WIB

Jakarta, 4 Juni 2012

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI